

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Administrasi menurut Siagian (2008:9) merupakan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Organisasi menurut Siagian (1986:7) adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting yang mempelajari kehidupan bernegara yang meliputi lembaga Legislatif, yudikatif, dan Eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah seperti : departemen-departemen, dan dinas-dinas mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan

pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan good governance.

1. Konsep Administrasi

Manusia memiliki potensial yang secara rasional dapat membentuk hubungan kerja sama antara sesamanya ketika tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan. Pada bentuk kerja sama demikian, kerja sama dapat dikonsepsikan sebagai “ administrasi”.

Menurut Waldo (dalam Ali, Faried, 2011; 187) administrasi adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama.

Pengertian atas batasan administrasi telah banyak para ahli yang mengemukakannya, antara Sapirin (1986;76), memberikan dua pengertian administrasi, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit, yakni merupakan kegiatan pencatatan surat, data dan dokumen dalam suatu kantor atau unit kerja tertentu untuk sekarang istilah besarnya adalah pelayanan
2. Administrasi dalam arti luas yakni meliputi memimpin, menguasai, melaksanakan hukum-hukum melayani/ mengatur kepentingan atau negara.

Administrasi menurut Siagian (2014;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Siagian (2003; 3) mengatakan bahwa unsur- unsur yang utama dan administrasi adalah:

1. Dua orang manusia atau lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan
4. Sarana dan prasaran

Dari segi administrasi dibagi atas dua bagian besar yaitu: Administrasi Negara dan Administrasi Privat. Menurut Gordon (dalam Syafii. 2003;33) Administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai keseluruhan proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Afifuddin 2010; 5) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Penulis menyimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kerja sama yang dilakukan antara dua orang manusia atau lebih yang memberikan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

2. Konsep Organisasi

Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi, yang merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, sebagian besar kegiatan-kegiatan para warganya dilangsungkan dalam organisasi modern, dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat dengan organisasi.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli,2009;71) organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan Zulkifli (2009;71) Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Hamin (2005; 117) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan Siagian (2003; 96) organisasi sebagai wadah adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan ,sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (dalam Budiardjo 2009; 17)

Menurut Robbins (1994; 49) Organisasi adalah kesatuan (entity) social yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus- menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Irra (2011; 10) organisasi adalah kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka, jalinan hubungan kerjasama diantara para pekerja dalam suatu wadah bagi setiap segenap usaha mencapai tujuan tertentu.

Penulis menyimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau suatu system yang saling mempengaruhi antara orang individu dan kelompok yang bekerjasama dalam lingkungan organisasi, dan dapat dipastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

3. Konsep Manajemen

Menurut Siagian (2003; 5) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dalam definisi ini, manajemen dititik beratkan pada usaha memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Hal ini dalam pencapaian tujuan tersebut orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang jelas.

Lebih lanjut Terry (dalam Hasibuan 2009;2) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli & Nurmasari 2015; 4) Manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

- a) Manajemen sebagai suatu proses
- b) Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c) Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Sedangkan Millet lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan yaitu:

- a) Proses pengarahan (*process of directing*), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan.
- b) Proses pemberian fasilitas kerja (*process of facilitating the work*), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan. (dalam Siswanto 1987; 4)

Selanjutnya Stoner.

Penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai tindakan-tindakan, yang berfungsi untuk melaksanakan

kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bersama dalam batas- batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

4. Konsep Fungsi

Sutarto (2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Musanef (2004:10) menjelaskan “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktifitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian tertentu “.

Selanjutnya Siagian (2006:155) mengemukakan, “Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan, “*derivation*” dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan”.

Sedangkan menurut Nasucha (2010 : 22) fungsi adalah rincian yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut. Definisi

fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang

5. Konsep Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam suatu organisasi, yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan pengawasan kinerjanya, karena itulah manusia juga perlu manajemen.

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Veithzal Rivai (2009; 1) menjelaskan bahwa Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian.

Menurut Mangkunegara (2011;10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Marihot (dalam Danang, 2013; 1) mengatakan manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Hasibuan (2007; 10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

Penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia ialah satu- satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan besar sulit untuk mencapai tujuan dan tidak berjalan dengan semestinya sesuai tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi tersebut. Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada dalam organisasi, dan merupakan modal dasar dalam organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

6. Konsep Pengawasan

Controlling atau pengawasan sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula.

Menurut Terry (1990;166) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.(dalam Zulkifli& Yogia.A.Moris 2014;134).

Menurut Siagian (2003;112) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai alat administrasi dan manajemen, Pengawasan dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua proses pengamatan yakni Pengawasan Langsung dan tidak langsung.

Seperti yang dikemukakan Siagian, Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Menurut Robert (1972;2) Pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien

Pengawasan yaitu proses penjamin pencapaian tujuan organisasi. Hal ini berkaitan erat antara pengawasan dan perencanaan dan penetapan tujuan berdasarkan pada standart atau sasaran.

Batasan konsep pengawasan yang mencantumkan indikator pengukuran dapat dilihat pada batasan yang dirumuskan oleh Massie (1983; 96) sebagai berikut. Pengawasan adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan ke arah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagai aktivitas pengukuran terhadap prestasi organisasi, berarti sebelum pengawasan dilaksanakan telah dipersiapkan terlebih dahulu alat atau sarana ukur serta metode kerjanya. Lebih luas dapat dikatakan bahwa sebagai suatu variabel yang menjamin tertib atau disiplin organisasi, berarti pengawasan secara konseptual telah dimulai pada saat merumuskan dan menyepakati rencana kerja organisasi untuk kurun waktu tertentu. Jika demikian realitasnya, berarti pengawasan itu merupakan suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Nickels (1997;8) mengatakan bahwa pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Beberapa diskripsi beberapa batasan pengawasan di atas, terlihat bahwa fungsi manajemen yang satu ini sebagai proses merupakan suatu sistem yang

terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan mengembangkan teori sistem. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh, saling interdependensi antar sesamanya. Menurut Swastha (1985;217), pelaksanaan pengawasan sebagai suatu sistem terdiri dari tiga tahap kegiatan yaitu: (1) Menentukan Standar, (2) Mengukur kerja terhadap standar; (3) Membetulkan penyimpangan dari standar dan rencana.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (1990; 196-169) sebagai berikut:

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (hasil pengamatan, laporan dan data statistik).
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

7. Konsep Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung atau yang di sebut nama lain menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi kampung pasal 1 ayat 13 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis .

Tugas, fungsi, dan hak Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di jelaskan pada pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Pasal 3 Bapekam Mempunyai Fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan kampung bersama penghulu
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung
- c. Melaksanakan pengawasan kinerja penghulu

Pasal 4 Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan kampung bersama penghulu
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu
- d. Membentuk panitia pemilihan penghulu

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu
- g. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)
- h. Menetapkan calon Penghulu Terpilih

Pasal 5 Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) mempunyai hak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Kampung
- b. Menyatakan Pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan Pemberdayaan masyarakat Kampung
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam Melakukan Pengawasan terhadap Perangkat Kampung, di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi Penulis 2017

C. Hipotesis

Pada Penelitian ini penulis dapat menetapkan hipotesis yaitu sebagai berikut: “Diduga Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam Melakukan Pengawasan terhadap Perangkat Kampung, di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik” melalui Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi menurut Sondang P Siagian (2014;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Siagian (dalam Zulkifli,2009;71) organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
4. Menurut Terry (1990;166) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.
5. Fungsi adalah penetapan pelaksanaan kinerja yang diemban dalam pencapaian tujuan yang terarah.

6. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi kampung pasal 1 ayat 13 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demogratik.
7. Menetapkan peraturan Kampung adalah pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Kampung dengan menetapkan peraturan Kampung dengan tujuan agar tidak terjadinya kesenjangan kesewenangan.
8. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah pengembangan kemajuan desa dengan membangun sebahagian apa yang menjadi keinginan rakyat dalam kemajuan pembangunan Kampung maupun masyarakat desa
9. Mengawasi pelaksanaan peraturan Kampung adalah mengawasi berlangsungnya peraturan Kampung oleh BPD agar tidak terjadinya kesewenangan oleh perangkat desa dan pelaksanaan yang salah.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Kampung dalam Melakukan Pengawasan terhadap Perangkat Kampung, di Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Fungsi adalah merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian pencapaian tujuannya, Rumanti (2002;71)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung	1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama	1. Mengadakan Rapat Pembahasan 2. Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting. 3. Persetujuan terhadap Raperdas.	Nominal
		2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1. Musyawarah terhadap masyarakat desa. 2. Melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa . 3. Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keiginan masyarakat desa.	Nominal
		3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung	1. Mengawasi berlangsungnya pembagunan Kampung . 2. Mengawasi kinerja pemerintah Kampung . 3. Pengawasan kebijakan pemerintah Kampung .	Nominal

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2018

F. Teknik Pengukuran

Guna mengetahui Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Kampung dalam Melakukan Pengawasan terhadap Perangkat Kampung, di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka dilakukan pengukuran secara keseluruhan dengan tiga tingkatan atau variasi penilaian yaitu sebagai berikut:

Berfungsi :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Siak 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Siak 33%-65%

Kurang Berfungsi :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tualang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Siak 0%-32%

Katagori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan desa, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

3. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%